2023

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan

TRIWULAN III

- PENDAHULUAN
- PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KINERJA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu tiga bulan dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, Oktober 2023
KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731118 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I 1

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN..... 2

C. GAMBARAN UMUM..... 3

D. DASAR HUKUM 6

E. SISTEMATIKA 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN 17

B. REALISASI ANGGARAN..... 63

BAB IV P E N U T U P..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berfungsi untuk mengetahui

kemampuannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

a) Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
b) Menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis;
c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

d) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

e) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif – efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

a. Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Di samping itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;

b) pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta

sarana distribusi perdagangan;

d) pelaksanaan administrasi bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 11 Tahun 2022 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

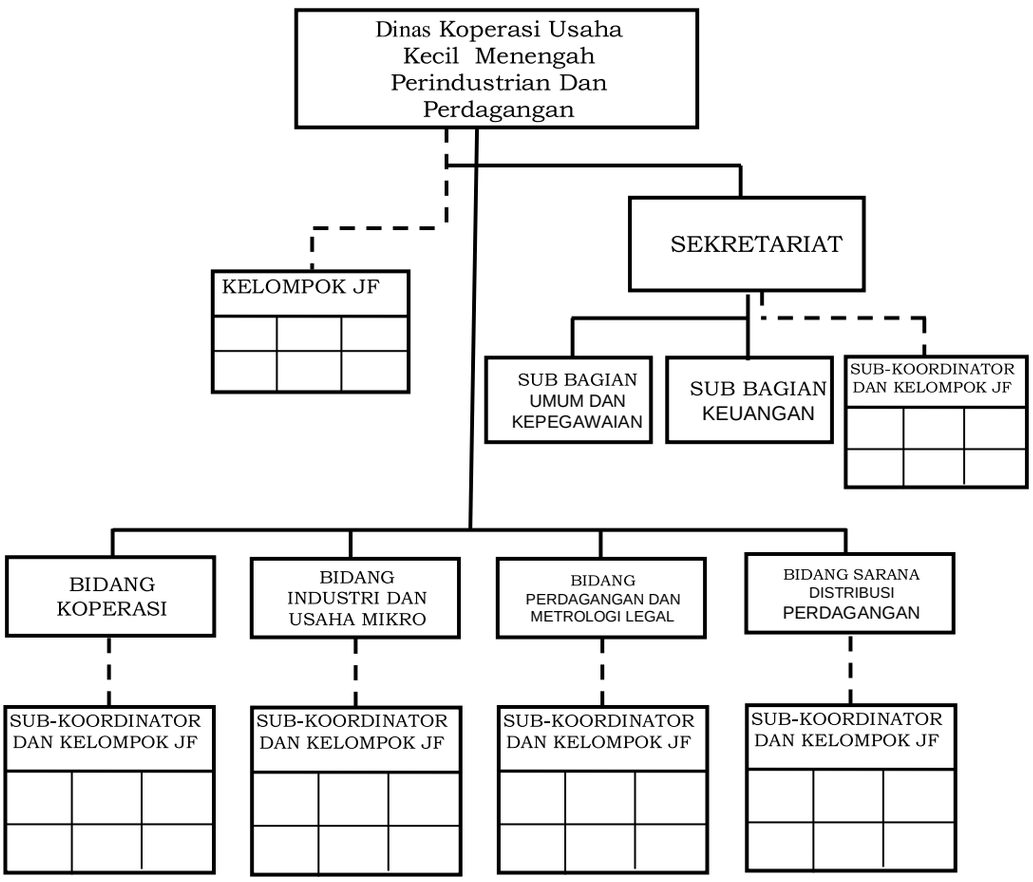

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

b. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 257 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 75 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 177 orang, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang, dan Petugas Pendamping Koperasi sebanyak 2 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada akhir September tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 September 2023

No	Pendidikan	Status Kepegewaian				Jumlah	%
		PNS	TKK	PPKL	Pendamping		
1	SD	3	8			11	4,28%
2	SMP	13	16			29	11,28%
3	SMA/SMK	34	110			144	56,03%
4	D1	0	1			1	0,39%
5	D2	0	2			2	0,78%
6	D3	2	2			4	1,56%
7	D4	0	1			1	0,39%
8	S1	18	36	3	1	58	22,57%
9	S2	5	1		1	7	2,72%
	Jumlah	**75**	**177**			**257**	

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang proporsi paling banyak adalah lulusan SMA/SMK sebanyak (56,03%) diikuti D4/S1 (22,96%), SMP (11,28%), SD (4,28%), S2 (2,72 %), D2 dan D3 (2,34%), dan yang paling kecil D1 (0,39%).

Jumlah pegawai per unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang per 30 September 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Per 30 September 2023

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat	34	
2	Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal	19	
3	Bidang Usaha Mikro dan Industri	15	
4	Bidang Koperasi	16	
5	Bidang Sarpras	173	

	JUMLAH	257	

Dilihat dari Pegawai Per Unit Kerja dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak hanya ada di tingkat II (dua) saja akan tetapi juga menyebar di 15 kecamatan yang terdiri 29 pasar.

c. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
21. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

22. Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

d. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
    1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan ;

2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.;

B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Perubahan Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Akan tetapi menindaklanjuti hasil Laporan Kinerja Tahun 2022 tentang sasaran nilai PDRB sektor koperasi diketahui bahwa realisasi nilai PDRB sektor koperasi pada tahun 2021 dan 2022 jauh dibawah target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra (P-Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 – 2023 sebagaimana dijelaskan pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran nilai PDRB Sektor Koperasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Sasaran	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
	2021 (Rp. Juta)	2022 (Rp. Juta)	2021 (Rp. Juta)	2022 (Rp. Juta)
Nilai PDRB sektor Koperasi	185.399,98	187.163,47	34.983,1	38.006,5

Penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut karena adanya kesalahan penetapan target nilai PDRB Sektor Koperasi dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru yang mengadopsi dari indikator pada Kementrian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, dan tidak ditemukannya acuan/referensi PDRB Sektor Koperasi Kabupaten Lumajang pada tahun-tahun sebelumnya. Langkah antisipatif yang sudah dilakukan adalah melaksanakan rapat koordinasi antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang tentang realisasi nilai PDRB Sektor Koperasi dan nilai PDRB sektor usaha mikro pada tanggal 18 Maret 2021 dimana disepakati bahwa nilai PDRB sektor koperasi diasumsikan sama dengan nilai PDRB sub sektor jasa keuangan lainnya.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwasanya penetapan target

tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan hasil kajian PDRB yang dilaksanakan oleh Bappeda untuk kajian nilai PDRB sektor Koperasi tahun 2021 dan hasil kajian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk nilai PDRB sektor koperasi tahun 2022. Sehingga dibutuhkan penyesuaian target kinerja nilai PDRB sektor koperasi pada tahun 2023. Adapun penetapan target perubahan nilai PDRB sektor koperasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perubahan Target Kinerja nilai PDRB Sektor Koperasi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Kinerja		Target Kinerja 2023 (Rp. Juta)
	2021 (Rp. Juta)	2022 (Rp. Juta)	
Nilai PDRB sektor Koperasi	34.983,1	38.006,5	41.237,05

Perhitungan perubahan target kinerja tersebut berdasarkan trend kenaikan realisasi tahun 2022 dari realisasi tahun 2021. Sehingga pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 terdapat perubahan sasaran dengan indicator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3. Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2023 (Rp. Juta)
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan	Data BPS	Rp 3.454.887,19
Meningkatnya nilai PDRB sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Data BPS	Rp 4.934.785,71
Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Hasil Kajian Perhitungan PDRB sektor Usaha Mikro	Rp 10.489.913,26
Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Hasil Kajian Perhitungan PDRB sektor Koperasi	Rp 41.237,05
Meningkatkan Pendapatan Perkapita	Nilai Pendapatan Per Kapita	Data BPS	Rp 22,279

Sumber : Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya:

a. Adanya revisi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, sehingga adanya Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) pada pertengahan tahun melalui Perubahan APBD

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp. Juta)
1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp	Rp 3.454.887,19
2. Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp	Rp 4.934.785,71
3. Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	Rp 10.489.913,26
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	Rp 41.237,05
5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Rp	Rp 22,279

Adapun Program, kegiatan dan Sub kegiatan serta anggaran tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan tanggal 22

September 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH	**21.791.310.744**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	9.000.326.764
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	0
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	7.114.324.878
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.106.200.878
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.124.000
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	0
1.4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	0
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	294.809.216
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.988.004
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.820.375
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.458.837
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	1.485.000
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.057.000
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.325.117.200
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.125.200
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	977.992.000
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	266.075.470
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.475.550
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.600.000
1.8.3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	5.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.999.920
II	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**1.000.000**
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota	1.000.000
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota	1.000.000
III	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	20.400.000
3.1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	20.400.000
3.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.400.000
IV	**Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi**	15.000.000
4.1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	15.000.000
4.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000
V	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	310.544.000
5.1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	310.544.000
5.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	310.544.000
VI	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	1.145.330.000
6.1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	1.145.330.000
6.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.145.330.000
VII	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	11.143.450.000
7.1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	11.143.450.000
7.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	195.700.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10.947.750.000
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	155.259.980
8.1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	155.259.980
81.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi danPengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	155.259.980
IX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**3.700.622.280**
9.1	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	1.000.000
9.1.2	Pengawasan Distribusi,Pengemasan danPelabelan BahanBerbahaya TerhadapPengguna Akhir BahanBerbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2 (P-B2)	1.000.000
X	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	3.350.791.400
10.1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	2.510.791.400
10.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	939.391.400
10.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.571.400.000
10.2	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	840.000.000
10.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	840.000.000
XI	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	18.950.000
11.1	**Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/ Kota**	1.950.000
11.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barangdalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	750.000
11.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.200.000
11.2	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsididi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	17.000.000
11.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.000.000
XII	**Program Pengembangan Ekspor**	100.000.000
12.1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	100.000.000
12.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000
XIII	**Program standardisasi dan perlindungan konsumen**	159.880.880

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
13.1	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan**	159.880.880
13.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	139.480.880
13.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.400.000
XIV	**Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri**	70.000.000
14.1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	70.000.000
14.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	70.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**4.788.169.281**
XV	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	4.786.169.281
15.1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	4.786.169.281
15.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000
15.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.686.169.281
XVI	**Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota**	1.000.000
16.1	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), IzinPerluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	1.000.000
16.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000
XVII	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	1.000.000
17.1	**Penyediaan Informasi Industri untukInformasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	1.000.000
17.1.1	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000
JUMLAH		30.280.102.305

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

a. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan

Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan

tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	: Sangat Baik
70 □ x < 85	: Baik
55 □ x < 70	: Cukup Baik
x < 55	: Kurang Baik

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feedback* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian

tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2023. Capaian indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN III TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi s.d Triwulan III	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	3.454.887,19	Belum dapat diukur (menunggu hasil kajian)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	4.934.785,71	Belum dapat diukur (menunggu hasil kajian)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	10.489.913,26	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	41.237,05	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
5.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	22,279	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 (Data diolah)

Adapun Program / Kegiatan / Sub Kegiatan penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 22,4%

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 31,18 %

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 20,00 %

Pada program ini melaksanakan program rutin sekretariat yang merupakan pendukung bagi kegiatan teknis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Capaian pada Triwulan III sebesar 20%.

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 18,75%

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25%

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 31,25%

Pada kegiatan ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, baik itu triwulan maupun semester, sehingga pada tiap – tiap triwulan melaksanakan penyusunan dokumen yang sama dengan periode yang berbeda. Adapun pada triwulan ini menghasilkan 5 dokumen antara lain penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 2 tahun 2023, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan Evaluasi Renja Triwulan I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak terdapat anggaran karena adanya recofusing anggaran, akan tetapi pelaksanaan kinerja tetap berjalan sehingga capaian realisasi sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 75%.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 2 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategi Diskopindag (Renstra) 2024-2026, dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 dan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Triwulan IV.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 5 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 1 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 1 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 1 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 dan 2 tahun 2023.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 8 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 2 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 2 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja yaitu Evaluasi kinerja triwulan yang tertuang dalam form E – 81 pada triwulan 1, 2 dan 3.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 25%

Kegiatan ini melaksanakan penyusunan seluruh dokumen keuangan yang terdiri dari laporan harian, bulanan, tribulan, semester dan tahunan. Dan juga dokumen yang berupa pengajuan SPJ kegiatan rutin dengan perinciannya hingga menjadi SP2D.

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target Kinerja Tahun 2023 : 75 orang / 12 bulan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 78 orang
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 77 orang
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 73 orang

Sub kegiatan ini melaksanakan penyerapan anggaran gaji untuk seluruh ASN yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan termasuk tunjangan tambahan penghasilan pegawai dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target Kinerja Tahun 2023 : 2 dokumen
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 dokumen
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 dokumen
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 dokumen

Sub kegiatan ini melaksanakan belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen dan pengelola keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Pelaporan realisasi triwulan III nihil karena *recofusing* anggaran.

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 3 dokumen

Sub kegiatan ini melaksanakan penatausahaan rutin sub bagian keuangan yaitu proses verifikasi pada dokumen pengajuan SPJ pada setiap bulannya.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25 %

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 25 %

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang dilakukan secara berkala, baik triwulan maupun semester. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tidak terdapat anggaran karena adanya recofusing anggaran, akan tetapi pelaksanaan kinerja tetap berjalan sehingga capaian realisasi sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 75%.

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi pengamanan Barang Milik Daerah, berupa proses penyertifikatan tanah milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan serta pengamanan aset yang sedang dalam sengketa. Pelaporan realisasi nihil karena *recofusing* anggaran.

1.3.2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Target Kinerja Tahun 2023	:	4 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023	:	1 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023	:	1 laporan
Realisasi Kinerja Tw III I2023	:	1 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi BMD yang berada di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Kantor Bidang Metrologi Legal serta 29 pasar yang dilaksanakan secara berkala / triwulan.

1.3.3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target Kinerja Tahun 2023	:	4 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023	:	1 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023	:	1 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023	:	1 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang berada di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Kantor Bidang Metrologi Legal serta 29 pasar yang dilaksanakan secara berkala / triwulan.

1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD
Target Kinerja Tahun 2023 : 100%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 25%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yaitu dari jasa pelayanan pasar dan jasa pelayanan tera – tera ulang yang dilaksanakan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan semester.

1.4.1 Penetapan Wajib Retribusi Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah
Target Kinerja Tahun 2023 : 2 dokumen
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 dokumen
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 2 dokumen
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 2 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penerbitan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) sesuai dengan ijin yang sudah disetujui dan STS Perijinan.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD
Target Kinerja Tahun 2023 : 100%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 20%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 36%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 23%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan/material, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 paket

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 paket

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 1 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan komponen – komponen instalasi listrik yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar.

1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 paket

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 paket

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan belanja alat – alat kebersihan, bahan pembersih dan ATK yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 paket

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 1 paket

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 1 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

1.5.4 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 paket
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 paket
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 paket
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan bahan / material khususnya pada pengisian APAR yang akan ditempatkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan IV.

1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Kinerja Tahun 2023 : 90 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 17 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 34 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 20 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa fasilitasi makan dan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi pengadaan BMD
Target Kinerja Tahun 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan barang penunjang operasional kantor. Realisasi nihil karena *recofusing* anggaran.

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Target Kinerja Tahun 2023 : 0 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 unit
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 unit

Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan alat Pendingin/AC. Realisasi nihil karena *recofusing* anggaran.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor
Target Kinerja Tahun 2023 : 100%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 25%

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang menujang urusan penyedian jasa operasional kantor.

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target Kinerja Tahun 2023 : 12 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 3 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 3 laporan

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan kegiatan belanja rutin untuk pembayaran tagihan rekening listrik, rekening air, rekening telepon, rekening internet untuk kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, kantor bidang metrologi legal dan pasar – pasar daerah.

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Kinerja Tahun 2023 : 12 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 3 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 3 laporan

Pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum ini melaksanakan pembelanjaan untuk gaji tenaga kontak bulanan, pembayaran BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan kematian.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD
Target Kinerja Tahun 2023 : 100%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 27%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 23%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 23%

Pada Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Target Kinerja Tahun 2023 : 73 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 16 unit
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 16 unit
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 20 unit

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kegiatan pemeliharan kendaraan dinas operasional/lapangan.

1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Target Kinerja Tahun 2023 : 66 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 40 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 7 unit
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 12 unit
Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini merupakan pemeliharaan ac, server, computer, printer, dan laptop.

1.8.3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Indikator Kinerja : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
Target Kinerja Tahun 2023 : 1 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 unit
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 unit
Pada sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ini berupa pemeliharaan aplikasi SI DILAN yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhap
Target Kinerja Tahun 2023 : 1 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 1 unit
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 unit
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 unit
Pada sub kegiatan berupa pemeliharaan gedung kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

Pada Program / kegiatan penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan ini merupakan program dan kegiatan yang melekat pada sekretariat dan tidak mencapai capaian kinerja 100%, dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas

dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Indikator Kinerja	:	Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam
Target Kinerja Tahun 2023	:	Rp 300.000.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2023	:	Rp 2.967.351.221
Realisasi Kinerja Tw II 2023	:	Rp 296.862.506.898
Realisasi Kinerja Tw III 2023	:	Rp 16.022.164.645

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam adalah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Tahun 2023 ini menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan motivasi kepada pengurus dan pengawas koperasi agar lebih memperhatikan legalitas perizinan usahanya dan dapat mengelola koperasinya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memiliki pengaruh atau dampak yang positif dalam upaya peningkatan kenaikan nilai omset koperasi simpan pinjam. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp 16.022.164.645, sehingga total omset sampai dengan triwulan III sebesar Rp 315.852.022.764.

2.1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	:	Persentase izin usaha simpan pinjam Koperasi
Target Kinerja Tahun 2023	:	80%
Realisasi Kinerja Tw I 2023	:	0%
Realisasi Kinerja Tw II 2023	:	0%
Realisasi Kinerja Tw III 2023	:	0%

Dalam rangka pembinaan terhadap Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang melalui bidang perkoperasian melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Tahun 2023. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 masih 0% dikarenakan koperasi simpan

pinjam yang mengajukan pembukaan kantor cabang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan terbaru KemenKopUKM Nomor 8 tahun 2023.

2.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Usaha SimpanPinjam dan PembukaanKantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor KasKoperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi denganWilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 unit usaha

Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari pihak koperasi dalam memenuhi legalitas operasionalnya, sehingga bisa meminimalisir koperasi yang tidak resmi/ rentenir berkedok koperasi di masyarakat. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 masih 0% dikarenakan koperasi simpan pinjam yang mengajukan pembukaan kantor cabang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan terbaru KemenKopUKM Nomor 8 tahun 2023.

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Target Kinerja Tahun 2023 : 74,62%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0,38%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 80,64%

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 82%. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebesar 80,64%.

3.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 13 koperasi

Dilaksanakannya Pengawasan/Pemeriksaan Koperasi, diharapkan pengelolaan Koperasi di Kabupaten Lumajang bisa lebih baik, yang memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 13 koperasi.

3.1.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 13 koperasi

Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta meneliti catatan dan pembukuan yang ada koperasi. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 13 koperasi.

3.1.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja

Target Kinerja Tahun 2023 : 300 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 303 koperasi

Pemeriksaan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasai tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi. Tidak terdapat anggaran pada sub kegiatan ini akan tetapi terdapat realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 303 unit usaha.

IV. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat

Target Kinerja Tahun 2023 : 28%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 24,4%

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0%

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 nihil.

4.1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat

Target Kinerja Tahun 2023 : 33 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 33 koperasi

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 koperasi

Dilaksanakannya penilaian kesehatan yang dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performa dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta penerapan prinsip syariah bagi KSPPS/USPPS. Selain itu, Penilaian Kesehatan Koperasi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri koperasi. Realisasi kinerja triwulan III Tahun 2023 koperasi simpan pinjam yang sehat nihil karena 2 unit usaha yang dinilai berkategori cukup sehat.

4.1.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Target Kinerja Tahun 2023 : 111 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 111 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 2 unit usaha

Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, ataupun koperasi lain, wajib mengelola usahanya secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga koperasi senantiasan dalam keadaan “sehat” sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat. Realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 2 unit usaha yang dinilai kesehatannya dan berkategori cukup sehat.

V. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Indikator Kinerja : Persentase Pendidikan Koperasi
Target Kinerja Tahun 2023 : 86%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 21 %
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 9 %
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 %

Pendidikan dan latihan perkoperasian adalah salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Melalui pendidikan, anggota juga dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai, prinsip-prinsip dan praktik-praktik koperasi.

5.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian
Target Kinerja Tahun 2023 : 250 orang
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 60 orang
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25 orang
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 orang

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, pengawas, atau karyawan dalam bidang pengetahuan perkoperasian, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan dan usaha. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 nihil karena akan dilaksanakan pada triwulan IV.

5.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
Target Kinerja Tahun 2023 : 250 orang
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 60 orang
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25 orang

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 orang

Pelatihan koperasi berorientasi pada kinerja, dengan maksud untuk memperbaiki keahlian pekerja sehingga dapat lebih mampu dalam menjalankan tupoksi pekerjaannya sehingga SDM pengelola koperasi memiliki kualitas yang baik, memiliki kemampuan manajemen yang baik serta berwawasan/pegetahuan luas. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 nihil karena akan dilaksanakan pada triwulan IV.

VI. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 64,94 %

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 24,3%

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 10,1%

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 %

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan unit usaha lainnya. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 81%. Realisasi Kinerja Triwulan III nihil.

6.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 200 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 60 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25 orang

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 orang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan fasilitasi untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023 nihil.

6.1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
Target Kinerja Tahun 2023 : 200 orang
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 60 orang
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 25 orang
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 orang

Bentuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah pembinaan dan sosialisasi ke Koperasi Unit Desa (KUD), dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang UKM dan kewirausahaan bagi SDM yang mengelola Koperasi Unit Desa (KUD). Realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023 masih nihil karena akan dilaporkan pada triwulan IV.

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro
Target Kinerja Tahun 2023 : 76%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 18%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 18%

UMKM merupakan salah satu barometer perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan

Usaha Mikro sebesar 76%. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 sebesar 18%

7.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro
Target Kinerja Tahun 2023 : 248 usaha mikro
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 58 usaha mikro
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 58 usaha mikro

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan merupakan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro yang targetnya sebanyak 220 usaha mikro. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 adalah sebanyak 58 usaha mikro.

7.1.1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kabupaten
Target Kinerja Tahun 2023 : 220 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 64 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 131 unit usaha

Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro bertujuan memberikan gambaran potensi dan permasalahan usaha mikro yang nantinya dapat direncanakan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lumajang. Tidak hanya itu, dengan adanya informasi yang lengkap dapat mempromosikan potensi usaha mikro di Kabupaten

Lumajang sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada berbagai UMKM yang terdapat di Kabupaten Lumajang.

7.1.2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha
Target Kinerja Tahun 2023 : 248 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 58 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 58 unit usaha

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah belanja dana hibah penguatan modal. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 masih 58 unit usaha dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

VIII. Program Pengembangan UMKM

Indikator Kinerja : Persentase Perkembangan Usaha Mikro
Target Kinerja Tahun 2023 : 74%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0%

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM. Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 masih 0% dikarenakan akan pelaporan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

8.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Kinerja : Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi
Target Kinerja Tahun 2023 : 220 usaha mikro
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 150 usaha mikro
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 usaha mikro
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 usaha mikro

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan merupakan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro yang targetnya sebanyak 220 usaha mikro. Realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023 nihil karena akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

8.1.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Target Kinerja Tahun 2023 : 220 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 150 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 unit usaha
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 unit usaha

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar menjadi pelaku usaha mikro yang mandiri dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha pelaku usaha mikro, khususnya pada aspek produksi. Realisasi kinerja Triwulan III nihil karena akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

IX. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator Kinerja : Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha

Target Kinerja Tahun 2023 : 90%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0%

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0%

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai indikator Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha sebesar 90%. Realisasi kinerja Triwulan III nihil karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

9.1. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 unit

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 laporan

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko akibat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya. Realisasi kinerja Triwulan III nihil karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

9.1.1. Pengawasan Distribusi,Pengemasan dan Pelabelan BahanBerbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna

Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 laporan

Bentuk kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yaitu Pelaksanaan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dengan target kinerja sebanyak 1 laporan, realisasi kinerja Triwulan III nihil karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

X. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Nilai retribusi pelayanan pasar
Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 8.008.609.100
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 2.232.753.081
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : Rp 1.887.832.425
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : Rp 2.031.649.562,50

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja nilai retribusi pelayanan pasar dimana setoran retribusi ini merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang dari pemungutan retribusi pelayanan pasar. Adapun target nilai retribusi pelayanan pasar tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 8.008.609.100 sehingga realisasi Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp 2.031.649.562,50.

10.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : prosentase sarana yang dibangun/ direhab
Target Kinerja Tahun 2023 : 13,79%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 %
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 %
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 3 %

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase sarana

yang dibangun/ direhab, belum ada pasar yang direhab/dipelihara antara lain Pasar Serangin sehingga realisasi kinerja sebesar 3%.

10.1.1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
Target Kinerja Tahun 2023 : 29 pasar
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 29 pasar
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 29 pasar
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 29 pasar

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Adapun jumlah sarana distribusi perdagangan semula sebanyak 30 pasar menjadi 29 pasar dikarenanakan peralihan Pasar Artagama menjadi Ruang Terbuka Hijau terhitung mulai tanggal 1 November 2022.

10.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Target Kinerja Tahun 2023 : 29 pasar
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 29 pasar
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 29 pasar
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 29 pasar

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pasar mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dimana capaian pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 29 pasar.

10.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Indikator Kinerja : Jumlah pengelola pasar yang dibina
Target Kinerja Tahun 2023 : 64 orang
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 64 orang
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 64 orang
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 64 orang

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya mempunyai indikator kinerja jumlah pengelola yang dibina yang lebih

difokuskan ke petugas retribusi pasar dengan tujuan meningkatkan ketelitian dalam perhitungan kembali retribusi yang telah diterima sangat dibutuhkan. Karena seringkali terdapat uang yang sudah tidak layak beredar dalam penarikan retribusi, sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu untuk menghindari pemungutan-pemungutan liar yang sering terjadi. Adapun pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 adalah 64 orang.

10.2.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 3 dokumen

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan merupakan kegiatan monitoring benda berharga di pasar rakyat. Target kinerja pada 2023 yaitu 12 dokumen sedangkan realisasi kinerja pada Triwulan III yaitu 3 dokumen.

XI. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Kinerja : Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil

Target Kinerja Tahun 2023 : 84%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 92%

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 85%

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 92,31%

Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kegiatan monitoring barang kebutuhan pokok yang harganya stabil yang dihitung berdasarkan koefisien harga antar waktu yaitu 13 komoditi antara lain :

1) Beras = 7,44%

2) Jagung = 0%
3) Kedelai = 2,15%
4) Bawang Merah = 12,05%
5) Bawang Putih = 3,75%
6) Cabe Merah = 0,57%
7) Cabe Rawit = 5,46%
8) Daging Sapi = 1,45%
9) Daging Ayam Ras= 3,03%
10) Telur Ayam Ras= 3,84%
11) Gula Pasir= 0,00%
12) Minyak Goreng Kemasan= 6,73%
13) Tepung Terigu = 2,44%

Berdasarkan perhitungan tersebut yang koefisien harga antar waktu dibawah 10% sejumlah 12(sebelas) komoditi sehingga dapat dikatakan stabil. Satu komoditi kurang stabil yaitu komoditi bawang merah mengalami penurunan rata-rata harga cukup anjlok dari bulan Juli sebesar Rp 30.700 per kg ke bulan September sebesar Rp 23.000 per kg. Sedangkan komoditi lain yang mengalami kenaikan harga tetapi tidak signifikan yaitu komoditi beras, hal ini disebabkan karena musim gadu (Juni-September) dan fenomena iklim sehingga menyebabkan produksi beras yang menurun dibandingkan dengan musim panen raya (Februari-Mei).

11.1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan
Target Kinerja Tahun 2023 : 13 barang
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 13 barang
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 13 barang
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 13 barang

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil secara pemantauan langsung maupun yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Komoditi yang dipantau sejumlah 13 komoditi antara lain beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, daging

sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng kemasan, kedelai, dan tepung terigu.

11.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Target Kinerja Tahun 2023	:	2 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023	:	2 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023	:	0 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023	:	0 laporan

Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil dan tesedianya data panel/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen (penggilingan), pedagang grosir dan pedagang eceran secara berkala, data tersebut bisa digunakan sebagai indikator pengambilan kebijakan jika sewaktu-waktu ada ketidakstabilan harga dan pasokan pangan di pasar. Adapun capaian kinerja pada triwulan ini nihil karena *recofusing* anggaran.

11.1.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Target Kinerja Tahun 2023	:	1 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 1 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 laporan

Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebab, seringkali ada kenaikan harga pada saat terutama pada saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan menjelang pergantian tahun. Sub kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya mengalami kenaikan harga. Menjelang puasa 2023, harga kebutuhan pokok mulai berangsur naik. Sub kegiatan ini sudah dilaksanakan di Triwulan I sedangkan realisasi kinerja Triwulan III nihil karena pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober.

11.2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi
Target Kinerja Tahun 2023 : 42 kios
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 kios
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 kios
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 kios

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan apakah yang tercantum sesuai dengan yang telah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Jumlah kios sebagai objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi pada Triwulan III nihil karena akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

11.2.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan

Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 laporan
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 laporan
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 laporan
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 laporan

Pupuk selalu menjadi masalah krusial dalam usaha tani. Seringkali masalah kelangkaan menjadi momok menakutkan petani menjelang musim tanam. Karenanya, pengawasan harus terus diintensifkan agar pupuk subsidi tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi belum dilaksanakan Triwulan III sehingga realisasinya masih nihil.

XII. Program Pengembangan Ekspor

Indikator Kinerja : - Nilai Ekspor
- Nilai Perdagangan Antar Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : - Rp 1.200.000.000.000
- Rp 4.031.600.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : - Rp 210.387.629.455
- Rp 4.636.552.419

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : - Rp 2.184.470.841
- Rp 1.140.690.954

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : - Rp 191.801.581.631
- Rp 0

Ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dari kegiatan ekspor dan impor sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Ekspor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dari kegiatan ekspor sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan. Adapun rekapitulasi nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah ini Triwulan III tahun 2023 masing-masing sebesar Rp 191.801.581.631 dan Rp 0.

12.1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : nilai omset promosi dagang

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 20.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 0
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : Rp 0
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : Rp 17.130.000

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dimana indikator kinerja kegiatan ini nilai omset promosi dagang. Realisasi kinerja pada Triwulan III yaitu Rp 17.130.000, promosi berupa pameran APKASI dilaksanakan pada sedangkan Jatim Fair dan misi dagang tidak dapat dilaksanakan karena *recofusing* anggaran.

12.1.1 Pameran Dagang Nasional

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
Target Kinerja Tahun 2023 : 15 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 17 pelaku usaha

Pameran Dagang Nasional berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat nasional yaitu pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2023. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pameran ini sebanyak 17 pelaku usaha.

12.1.2 Pameran Dagang Lokal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal
Target Kinerja Tahun 2023 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 pelaku usaha

Pameran Dagang Lokal berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat provinsi Jawa Timur antara lain pameran Jatim Fair 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Grand City Mall & Convex Surabaya pada bulan Oktober

2023. Ajang Jatim Fair merupakan sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk memotivasi promosi dan meningkatkan transaksi dagang selama dan sesudah pameran sebagai sarana tolak ukur daya saing produk. Akan tetapi kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena *recofusing* anggaran.

12.1.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
Target Kinerja Tahun 2023 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 pelaku usaha

Misi dagang adalah kegiatan untuk memperluas pangsa pasar dalam negeri dengan cara mempertemukan antara para penjual dan pembeli potensial dari dua provinsi. Dengan adanya misi dagang, diharapkan hubungan angar pelaku usaha lintas provinsi semakin erat dan pertumbuhan ekonomi semakin naik. Akan tetapi kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena *recofusing* anggaran.

XIII. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja : Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang
Target Kinerja Tahun 2023 : 29%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 22,79%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 2,03%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 3%

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan indikator kegiatannya adalah prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang. Dimana persentase ini didapatkan dari jumlah Wajib Tera Ulang yang telah melaksanakan Tera / tera ulang dibagi dengan potensi Wajib Tera Ulang Kabupaten Lumajang sebanyak 29%, realisasi kinerja Triwulan III sebesar hanya 3%.

13.1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Kinerja : Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp. 175.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 31.451.900

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : Rp 32.331.900

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : Rp 41.994.600

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kegiatannya adalah Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang. Dimana realisasi kinerja pada Triwulan III Rp 41.994.600.

13.1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator Kinerja : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

Target Kinerja Tahun 2023 : 3.800 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3.319 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 306 unit

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 412 unit

Salah satu pendukung tercapainya pertumbuhan pasar tertib ukur adalah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator jumlah UTTP yang di tera, tera ulang. Dimana capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2023 yaitu 412.

13.1.2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

Target Kinerja Tahun 2023 : 225 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 196 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 7 orang

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 2 orang

Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal merupakan kegiatan pendukung dari program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dimana indikator kinerja yaitu pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina, dengan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2023 adalah 2 WTU.

XIV. Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah
Target Kinerja Tahun 2023 : 4%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0%
Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0%

Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri mempunyai indikator prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah dengan target kinerja pertumbuhan sebesar 4% dari pertumbuhan nilai perdagangan daerah 2021. Capaian kinerja kegiatan ini pada Triwulan III adalah 0% dikarenakan pelaporan dilaksanakan pada Triwulan IV.

14.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Nilai Perdagangan Daerah
Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 7.571.200.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 31.807.614.445
Realisasi Kinerja Tw II 2023: Rp 8.178.660.950
Realisasi Kinerja Tw III 2023: Rp 59.503.497.184

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai indikator nilai perdagangan daerah sebesar Rp 7.571.200.000.000. Penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri sangat diperlukan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri, baik melalui program-program promosi seperti sosialisasi produk dalam negeri maupun pameran-pameran, serta mengajak kepada semua pihak agar terus memberikan dukungan untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan menjaga kualitas. Realisasi nilai

perdagangan yang daerah pada Triwulan III sebesar Rp 59.503.497.184.

14.1.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 100 UMKM

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 UMKM

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 100 UMKM

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 UMKM

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/ kota, berupa event Pasar Ramadhan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II.

XV. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Kinerja : Nilai produksi industri

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 1.379.000.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 0

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : Rp 0

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : Rp 0

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator nilai produksi industri yaitu Rp 1.339.000.000.000. Realisasi kinerja Triwulan III sebesar 0 akan dilaporkan pada Triwulan IV.

15.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 125 ikm

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 ikm

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 ikm

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 288 ikm

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi tetapi capaian Triwulan III sebanyak 288 IKM.

15.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri sebanyak 1 dokumen tetapi pelaksanan penyusunan Naskah Akademik akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. sehingga capaian Triwulan III masih 0 dokumen.

15.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 dokumen

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat terkait Pelatihan GMP untuk Peningkatan Kualitas bagi IHT, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk IK Batik, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk IK Olahan Susu, Pelatihan Linting Rokok bagi IHT, Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan

Manajemen Wirausaha, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk IK Mebel, Pendampingan CPOB bagi IK Olahan Susu, Perolehan Sertifikasi Merek, Perolehan Sertifikasi Uji Nutrisi, Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat TKDN, Temu Mitra dengan Usaha Besar, Toko Modern dan Marketplace, Bantuan Kemasan Produk IKM dan Lainnya, Bantuan Mesin dan Peralatan IK Olahan Susu. Fasilitasi ini bertujuan untuk memacu daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun global. Sisi penting kemasan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana promosi yang berdaya jual. Pelaporan realisasi kinerja dilaksanakan Triwulan IV sehingga pada Triwulan III Tahun 2023 capaian terhadap target tahun 2023 masih 0%.

XVI. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI

Target Kinerja Tahun 2023 : 90%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 %

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 %

Realisasi Kinerja Tw III 2023 : 0 %

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota merupakan kegiatan memfasilitasi produk IKM untuk untuk mengantongi izin usaha. Kepemilikan izin usaha akan memberikan banyak manfaat untuk IKM. Di antaranya, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dan menjadi nilai plus dari pada bisnis IKM lain yang tidak memiliki IUMK. Manfaat lain terdaftarnya IKM yang memiliki izin usaha adalah mendapatkan akses untuk keperluan modal, dapat memiliki akses bekerja sama dengan minimarket, memiliki kesempatan untuk menjadi IKM binaan oleh pemerintah karena sudah terdaftar secara legal. Realisasi kinerja pada

Triwulan III sebesar 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

16.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 rekomendasi

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Kegiatan ini mempunyai indikator kinerja jumlah rekomendasi perolehan IUI sebanyak 2 rekomendasi. Realisasi kinerja pada Triwulan III adalah 0 rekomendasi dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

16.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen, akan tetapi realisasi kinerja triwulan III masih 0 dikarenakan *recofusing* anggaran.

XVII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Kinerja : Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri

Target Kinerja Tahun 2023 : 35%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0%

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 53%

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional adalah salah satu pendukung pancapaian PDRB sektor industri dimana mempunyai indicator kinerja prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri yaitu 35%. Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Realisasi Triwulan III sebesar 53%.

17.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 Dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 Dokumen

Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 Dokumen

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator jumlah dokumen informasi industri yang tersedia sebanyak 1 dokumen. Realisasi kinerja triwulan III masih 0 dikarenakan pelaporan dilaksanakan pada triwulan IV.

17.1.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengumpulan, pengelolaan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen
Realisasi Kinerja Tw II 2023: 0 dokumen
Realisasi Kinerja Tw III 2023: 0 dokumen

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Realisasi kinerja triwulan III masih 0 dikarenakan pelaporan dilaksanakan pada triwulan IV.

Untuk mengetahui penyerapan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan s.d Triwulan III Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	10.492.600.764	7.812.990.729 (74%)
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	11.298.709.980	5.295.859.045 (47%)
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.788.169.281	2.439.534.470 (51%)
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.451.791.400	2.159.313.906 (63%)
5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	248.830.880	173.173.980 (70%)

Dari tabel diatas menunjukkan dengan alokasi total pagu Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Rp 30.280.102.335,- dengan serapan anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 17.880.872.130 atau 59%.

Untuk Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat Tabel. 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Triwulan III	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Tidak dapat diukur karena menunggu	74%	Tidak dapat diukur

2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	47%	karena menunggu release data BPS
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	51%	
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	63%	
5.	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	70%	

Dari Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi belum dapat diukur dikarenakan capaian kinerja belum dapat diukur.

Dari Penjabaran diatas dapat diketahui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2023 berdasarkan target indikator kinerja program Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
   1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
   2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
   3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   4. Program Pengembangan UMKM
   5. Program Pengembangan Ekspor
   6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
   1. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
   2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
   4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   5. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
   6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   8. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
   9. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Hasil evaluasi 14 program yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan disebabkan oleh :

1. Beberapa sub kegiatan / kegiatan pada program tersebut yang dijadwalkan pada triwulan berikutnya.
2. Penundaan pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian terhadap program-program yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan PMK no 206 tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan *reschedule* kegiatan.
4. Kurangnya partisipasi pelaku usaha untuk melaporkan hasil kegiatan produksinya.
5. Adanya *recofusing* anggaran, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Analisis Tantangan serta Solusi Permasalahan

Dalam pencapaian sasaran pembangunan tidak lepas dari berbagai tantangan khususnya pada bidang koperasi, bidang perdagangan dan metrologi legal, dan industri dan usaha mikro yaitu :

1. Kurangnya kepatuhan koperasi dalam pelaksanaan RAT;
2. Dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan bahan bakar minyak dan sejumlah komoditi barang kebutuhan pokok;
3. Banyak produk UMKM yang belum memenuhi standart ekspor;

4. Sering berubahnya peraturan terkait perizinan yang menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan;
5. Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait pengendalian izin usaha serta sering berubahnya regulasi/peraturan terkait perizinan usaha.

Dari tantangan diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mengambil langkah - langkah kedepan untuk meminimalisir tantangan tersebut melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kapasitas SDM bagi pengurus, Pengawas dan anggota koperasi;
2. Pengendalian harga dengan pengendalian stok ketersediaan barang;
3. Melakukan pendampingan / inkubasi usaha terhadap calon / pelaku usaha eksportir. Serta mengembangkan industri yang berbasis potensi daerah utamanya produk yang berorientasi pada ekspor. Kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan industri yang berbasis pada potensi daerah utamanya produk yang berorientasi ekspor, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi;
4. Sosialisasi terhadap peraturan baru;
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penyesuaian kebijakan.

b. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan . Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Bupati Lumajang. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, maka pada tahun anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mendapatkan alokasi anggaran sesuai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan tanggal 22 September 2023 yaitu sebesar Rp 30.280.102.335 yang digunakan untuk melaksanakan 17 program meliputi 26 kegiatan 50 sub kegiatan.

Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN III	CAPAIAN (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	**10.492.600.764**	**7.812.990.729**	74
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	9.000.326.764	6.745.281.729	74
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	0	0	0
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
1.1.4	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	0	0	0
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	7.114.324.878	5.362.807.347	75%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.106.200.878	5.354.683.347	75%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.124.000	8.124.000	100%
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0,00%
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	0	0	0,00%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0,00%
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00%
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00%
1.4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	0	0	0,00%
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	0	0	0,00%
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	294.809.216	216.034.849	73%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN III	CAPAIAN (%)
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.988.004	7.762.650	97%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.820.375	77.617.200	94%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.458.837	43.059.450	79%
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	1.485.000	-	0%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.057.000	87.595.549	59%
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	0	0,00%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.325.117.200	999.276.789	75%
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.125.200	246.718.129	71%
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	977.992.000	752.558.660	77%
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	266.075.470	167.162.744	63%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.475.550	110.959.744	59%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	51.600.000	35.227.000	68%
1.8.3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	5.000.000	-	0%
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.999.920	20.976.000	100%
II	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**1.000.000**	0	0,00%
2.1	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota**	1.000.000	0	0,00%
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	1.000.000	0	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN III	CAPAIAN (%)
	Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota			
III	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	20.400.000	15.300.000	75%
3.1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	20.400.000	15.300.000	75%
3.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.400.000	15.300.000	75%
3.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0
IV	**Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi**	15.000.000	14.625.000	98%
4.1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	15.000.000	14.625.000	98%
4.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.625.000	98%
4.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	0
V	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	310.544.000	170.534.000	55%
5.1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	310.544.000	170.534.000	55%
5.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	310.544.000	170.534.000	55%
VI	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	1.145.330.000	867.250.000	76%
6.1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	1.145.330.000	867.250.000	76%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN III	CAPAIAN (%)
6.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.145.330.000	867.250.000	76%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG USAHA MIKRO	**11.298.709.980**	**5.295.859.045**	**47**
VII	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	11.143.450.000	5.144.020.000	46%
7.1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	11.143.450.000	5.144.020.000	46%
7.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	195.700.000		0%
7.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10.947.750.000	4.979.550.000	45%
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	155.259.980	151.839.045	98%
8.1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	155.259.980	151.839.045	98%
81.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi danPengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	155.259.980	151.839.045	98%
IX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**3.700.622.280**	**2.332.487.886**	**66**
9.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1.000.000	0	0,00%
9.1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahayadan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan PelabelanBahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.000.000	0	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN III	CAPAIAN (%)
9.1.2	Pengawasan Distribusi,Pengemasan danPelabelan BahanBerbahaya TerhadapPengguna Akhir BahanBerbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2 (P-B2)	1.000.000	0	0,00%
X	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	3.350.791.400	2.061.052.800	62%
10.1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	2.510.791.400	1.431.052.800	57%
10.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	939.391.400	253.252.800	27%
10.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.571.400.000	1.177.800.000	75%
10.2	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	840.000.000	630.000.000	75%
10.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	840.000.000	630.000.000	75%
XI	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	18.950.000	1.950.000	10%
11.1	**Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/ Kota**	1.950.000	1.950.000	100%
11.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barangdalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	750.000	750.000	100%
11.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.200.000	1.200.000	100%
11.2	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsididi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	17.000.000	0	0,00%
11.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.000.000	0	0,00%
XII	**Program Pengembangan Ekspor**	100.000.000	98.261.106	98%
12.1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang**	100.000.000	98.261.106	98%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN III	CAPAIAN (%)
	terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
12.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000	98.261.106	98%
12.1.2	Pameran Dagang Lokal	0	0	0,00%
12.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	0	0	0,00%
XIII	**Program standardisasi dan perlindungan konsumen**	159.880.880	101.962.380	64%
13.1	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan**	159.880.880	101.962.380	64%
13.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	139.480.880	86.662.380	62%
13.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.400.000	15.300.000	75%
XIV	**Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri**	70.000.000	69.261.600	99%
14.1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	70.000.000	69.261.600	99%
14.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	70.000.000	69.261.600	99%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**4.788.169.281**	2.439.534.470	51%
XV	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	4.786.169.281	2.439.534.470	51%
15.1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	4.786.169.281	2.439.534.470	51%
15.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	3.110.000	3%
15.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.686.169.281	2.436.424.470	52%
XVI	**Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota**	1.000.000	0	0,00%
16.1	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), IzinPerluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan**	1.000.000	0	0,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN III	CAPAIAN (%)
	Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
16.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000	0	0,00%
XVII	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	1.000.000	0	0,00%
17.1	**Penyediaan Informasi Industri untukInformasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	1.000.000	0	0,00%
17.1.1	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.000.000	0	0,00%
JUMLAH		30.280.102.305	17.880.872.130	59%

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Triwulan III 2023 dengan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	189.035.108.703	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	10.492.600.764	7.812.990.729	74	Belum dapat diukur
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp10.489.913.260.792	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	11.298.709.980	5.295.859.045	47	Belum dapat diukur

3	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.934.785.719.830	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	4.788.169.281	2.439.534.470	51%	Belum dapat diukur
4	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.454.887.194.442	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	3.451.791.400	2.159.313.906	63%	Belum dapat diukur
5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	22.279.999	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	248.830.880	173.173.980	70%	Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan III 2023

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel diatas ditetapkan untuk sasaran strategis kualitas Perdagangan masyarakat tingkat efisiensinya belum dapat diukur karena menunggu release data PDRB dari Badan Pusat Statistik. Adapun realisasi kinerja dan anggaran pada sampai dengan Triwulan III pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	Nilai PDRB sektor Koperasi	189.035.108.703	Menunggu data BPS		**10.492.600.764**	**7.812.990.729**	74
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100 %	73,53	73,53	9.000.326.764	6.745.281.729	74
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	00 %	75	0%	0	0	0
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3	100%	0	0	0
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	0%	0	0	0
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3	60%	0	0	0
1.1.4	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	6	75%	0	0	0
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan	100 %	75	75	7.114.324.878	5.362.807.347	75%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target		Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Perangkat Daerah							
1.2.1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	orang /12 bulan	73	97,3	7.106.200.878	5.354.683.347	75%
1.2.2	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	3	75	8.124.000	8.124.000	100%
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	3	75	0	0	0,00%
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100**	**%**	57	57	0	0	0,00%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	dokumen	0	0	0	0	0,00%
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	3	75	0	0	0,00%
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	3	75	0	0	0,00%
1.4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	**100**	**%**	75	75	0	0	0,00%
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah	2	dokumen	2	100	0	0	0,00%
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD**	100	%	79	79	294.809.216	216.034.849	73%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	1	paket	1	100	7.988.004	7.762.650	97%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Bangunan Kantor yang Disediakan						
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2	100	82.820.375	77.617.200	94%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1	50	54.458.837	43.059.450	79%
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	0	0	1.485.000	-	0%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	71	78,89	148.057.000	87.595.549	59%
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		0 %	0	0%	0	0	0,00%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit	0	0%	0	0	0,00%
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	100 %	75	75	1.325.117.200	999.276.789	75%
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9	75	347.125.200	246.718.129	71%
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	9	75	977.992.000	752.558.660	77%
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**	100 %	73	73,1	266.075.470	167.162.744	63%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	73 unit	52	71,2	188.475.550	110.959.744	59%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target		Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66	unit	59	89,4	51.600.000	35.227.000	68%
1.7.3	Pemeliharaan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	unit	0	0	5.000.000	-	0%
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	unit	1	100	20.999.920	20.976.000	100%
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam**	**300.000.000.000**	**rupiah**	315.852.022.764	105,28	**1.000.000**	0	0,00%
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha simpan pinjam Koperasi	80	%	0	0%	1.000.000	0	0,00%
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha SimpanPinjam dan PembukaanKantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor KasKoperasi Simpan Pinjamuntuk Koperasi denganWilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota	1	unit usaha	0	0%	1.000.000	0	0,00%
III	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	74,62	%	81,02	108,58	20.400.000	15.300.000	75%
3.1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	12	koperasi	15	125,0	20.400.000	15.300.000	75%
3.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	12	koperasi	15	125,0	20.400.000	15.300.000	75%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Kabupaten/Kota							
3.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	300	unit usaha	303	101	0	-	0
IV	**Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat**	28	%	29,20	104	15.000.000	14.625.000	98%
4.1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat**	33	koperasi	33	100,0	15.000.000	14.625.000	98%
4.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	111	unit usaha	113	101,8	15.000.000	14.625.000	98%
4.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	0	unit usaha	0	0	0	-	0
V	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase Pendidikan Koperasi**	86	%	29	34,0	310.544.000	170.534.000	55%
5.1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian**	250	orang	85	34,0	310.544.000	170.534.000	55%
5.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250	orang	85	34,0	310.544.000	170.534.000	55%
VI	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	**Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	64,94	%	28	43,17	1.145.330.000	867.250.000	76%
6.1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai**	200	orang	85	42,5	1.145.330.000	867.250.000	76%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi						
6.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 orang	85	42,5	1.145.330.000	867.250.000	76%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN USAHA MIKRO	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.489.913.260.792 rupiah	Menunggu data BPS	0%	**11.298.709.980**	**5.295.859.045**	**47**
VII	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro**	76 %	36	46,8	11.143.450.000	5.144.020.000	47%
7.1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro**	248 usaha mikro	116	46,8	11.143.450.000	5.144.020.000	47%
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan,Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Stadaisasi dan Restrukturasi Usaha Koperasi Kewenagan Kabupaten/Kabupaten	220 unit usaha	195	89	195.700.000	164.470.000	84%
7.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah Unit Usaha yang Telah	248 unit usaha	116	46,8	10.947.750.000	4.979.550.000	45%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target		Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dan Pengembangan Usaha Mikro	Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha							
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Perkembangan Usaha Mikro**	**74**	**%**	0	0	155.259.980	151.839.045	98%
8.1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi	220	usaha mikro	150	68	155.259.980	151.839.045	98%
8.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi danPengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi danPengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	220	unit usaha	150	68	155.259.980	151.839.045	98%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.454.887.194.442	rupiah	Menunggu data BPS	0	**3.700.622.280**	**2.332.487.886**	38%
		Nilai Pendapatan Perkapita	22.279.999	rupiah	Menunggu data BPS	0			
IX	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	90	%		0%	1.000.000	0	0,00%
9.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahayadan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan PelabelanBahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi	1	unit	0	0%	1.000.000	0	0,00%
9.1.1	Pengawasan Distribusi,Pengemasan danPelabelan BahanBerbahaya TerhadapPengguna Akhir BahanBerbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan BerbahayaTerhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1	Laporan	0	0%	1.000.000	0	0,00%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Anggaran		
			Target		Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
X	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Nilai retribusi pelayanan pasar**	8.008.609.100	rupiah	6.152.235.068,75	76,8	3.350.791.400	2.061.052.800	62%
10.1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**prosentase sarana yang dibangun/direhab**	13,79	%	3	25,0	2.510.791.400	1.431.052.800	57%
10.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	29	unit	29	100,0	939.391.400	253.252.800	27%
10.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29	unit	29	100,0	1.571.400.000	1.177.800.000	75%
10.2	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diWilayah Kerjanya**	**Jumlah Pengelola pasar yang dibina**	64	orang	64	100	840.000.000	630.000.000	75%
10.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	dokumen	9	75	840.000.000	630.000.000	75%
XI	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil**	84	%	69	82,14	18.950.000	1.950.000	10%
11.1	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan**	13	barang	13	100,0	1.950.000	1.950.000	100%
11.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	laporan	2	100,0	750.000	750.000	100%
11.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	1	laporan	1	100,0	1.200.000	1.200.000	100%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		(Satu) Kabupaten/Kota						
11.2	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi**	42 kios	0	0%	17.000.000	0	0,00%
11.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	0	0%	17.000.000	0	0,00%
XII	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	• Nilai Eksport • Nilai Perdagangan Antar Daerah	* 1.200.000.000.000 rupiah * 4.031.600.000.000	* 404.373.681.927 * 0	* 33,7% *0,1%	100.000.000	98.261.106	98%
12.1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**nilai omset promosi dagang**	20.000.000 rupiah	17.130.000	85,7	100.000.000	98.261.106	98%
12.1.1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 pelaku usaha	17	113,3	100.000.000	98.261.106	98%
12.1.2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 pelaku usaha	0	0%	0	0	0,00%
12.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 pelaku usaha	0	0%	0	0	0,00%
XIII	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang**	29 %	27	94,4	159.880.880	101.962.380	64%
13.1	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang**	175.000.000 rupiah	105.778.400	60,4	159.880.880	101.962.380	64%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
13.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.800 unit	4.037	106,2	139.480.880	86.662.380	62%
13.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	225 orang	205	91,1	20.400.000	15.300.000	75%
XIV	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah**	4 %	0	0	70.000.000	69.261.600	99%
14.1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Nilai Perdagangan Daerah**	7.571.200.000.000 rupiah	99.489.772.579	1,3	70.000.000	69.261.600	99%
14.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	100	100	70.000.000	69.261.600	99%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**Nilai PDRB Sektor Industri**	4.934.785.719.830 rupiah	Menunggu data BPS	0	**4.788.169.281**	2.439.534.470	51%
XV	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Nilai produksi industri**	1.379.000.000.000 rupiah	0	0%	4.786.169.281	2.439.534.470	51%
15.1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi**	125 ikm	288	230,4	4.786.169.281	2.439.534.470	51%
15.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	0	0%	100.000.000	3.110.000	3%
15.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	0	0%	4.686.169.281	2.436.424.470	52%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target		Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
XVI	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI**	90	%	0	0%	1.000.000	0	0,00%
16.1	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	2	rekomendasi	0	0%	1.000.000	0	0,00%
16.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokumen	0	0%	1.000.000	0	0,00%
XVII	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri**	35	%	0	0%	1.000.000	0	0,00%
17.1	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia**	1	dokumen	0	0%	1.000.000	0	0,00%
17.1.1	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, DataKawasan Industri serta Data Lain LingkupKabupaten/Kota melalui Sistem Informasi IndustriNasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengumpulan, pengelolaan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	1	dokumen	0	0%	1.000.000	0	0,00%

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)						
JUMLAH						30.280.102.305	17.880.872.130	59%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan III Tahun 2023. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis/RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan III Tahun 2023, yaitu Nilai PDRB Sektor Koperasi, Nilai PDRB Sektor Usaha Mikro, Nilai PDRB Sektor Industri, Nilai PDRB Sektor Perdagangan, Nilai Pendapatan Perkapita belum dapat diukur dikarenakan data tersebut menunggu release dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang. Adapun pencapaian Kinerja dan anggaran per program / kegiatan kurang sesuai dengan *schedule* yang direncanakan dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya dan pergeseran anggaran yang menyebabkan *reschedule* pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan masih perlu diambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja. Langkah tersebut antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan nilai perdagangan daerah, memfasilitasi pelaku IKM agar produk IKM mampu berdaya saing sehingga dapat meningkatkan PDRB sektor perindustrian, meningkatkan pertumbuhan jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang, merehabilitasi sarana, dan prasarana perdagangan.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan laporan kinerja ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan

dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.